



**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN PNS  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA  
KEPEGAWAIAN PNS PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

---

**A. LATAR BELAKANG**

• **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;

• **GAMBARAN UMUM**

Simpeg (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) SKPD merupakan pengembangan dari Simpeg BKD yang dibentuk dan disusun sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dimana diwajibkan adanya sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dalam implementasinya Simpeg disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap.

Simpeg adalah sistem yang mampu memberikan informasi data-data pegawai pada suatu organisasi atau instansi untuk saling berinteraksi mencapai tujuan yang ditargetkan. Simpeg menangani data kepegawaian khususnya meliputi pendataan pegawai, proses perencanaan, pengadaan dan formasi kepegawaian, mutasi pegawai dan lain sebagainya.

Simpeg di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah telah dirintis pengembangannya sejak tahun 2002. Dengan bergulirnya reformasi birokrasi, pengembangan Simpeg menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi layanan kepegawaian.

Penggunaan serta pemanfaatan Aplikasi Simpeg dalam proses pelayanan kepegawaian semakin luas dan tidak hanya terbatas pada pejabat pengelola kepegawaian saja, namun juga seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sinaga (Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian) antara lain presensi, cuti online, mutasi online, dan lain-lain. Aplikasi Sinaga telah digunakan oleh hampir seluruh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan saat ini dapat dioperasikan menggunakan Android, namun kedepan akan dikembangkan berbasis *multiplatform* (Android, iPhone, Web, dll). Dengan menggunakan aplikasi Sinaga ini, setiap PNS dapat melakukan presensi dengan menggunakan *smartphone* untuk mengetahui data presensi masing-masing serta mengakomodir presensi PNS dengan lokasi penugasan yang tidak terjangkau oleh mesin presensi maupun dengan kondisi-kondisi khusus.

Guna lebih mengoptimalkan dalam pengoperasian perlu disusun suatu kegiatan dalam pengelolaan data kepegawaian guna mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan mempunyai kompetensi untuk mengelola aplikasi layanan kepegawaian. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi tenaga pengelola aplikasi layanan kepegawaian secara menyeluruh untuk meningkatkan pelayanan dibidang kepegawaian di jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun suatu kerangka acuan kerja pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian PNS bagi pejabat pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rumusan langkah tindak lanjut tersebut dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa kegiatan Pengembangan Tengah 2020.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

- a. Mengkompilasi data kepegawaian yang ada di 49 (empat puluh Sembilan) satuan SKPD sesuai SOTK baru yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga menjadi satu kesatuan data informasi.
- b. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengoperasian aplikasi layanan kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung pengelolaan data kepegawaian.
- c. Meningkatkan kompetensi pengampu kepegawaian SKPD dalam Pengelolaan layanan kepegawaian melalui penggunaan aplikasi Simpeg SKPD beserta sub sistemnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **2. Tujuan**

- a. Menyajikan informasi data kepegawaian, sehingga dapat diperoleh gambaran/keadaan umum kepegawaian khususnya Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menyajikan informasi data kepegawaian, sebagai bahan guna memenuhi kebutuhan unsur pimpinan dalam rangka perencanaan, pembinaan pegawai serta kebutuhan lainnya.
- c. Mempercepat dan mempermudah proses integrasi, pertukaran, pengumpulan dan penyebaran informasi kepegawaian antara SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terwujudnya tenaga pengelola data kepegawaian di setiap SKPD yang kompeten dalam pengelolaan layanan kepegawaian.
- e. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.
- f. Percepatan proses implementasi dan pelatihan mengenai aplikasi maupun modul baru pada aplikasi layanan kepegawaian.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Guna mendukung tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud, Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah ini akan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Penyediaan informasi kepegawaian melalui pencetakan Buku Profi Kepegawaian
- b. Pertemuan dengan pengelola kepegawaian masing-masing SKPD dan pengembangan aplikasi serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD maupun penyelenggaraan pertemuan penghubung dengan mengundang pengelola kepegawaian seluruh SKPD Provinsi Jawa Tengah.
- c. Penyelenggaraan Bimbingan teknis (Bimtek) serta inventarisasi permasalahan dan kebutuhan melalui inventarisasi secara langsung ke SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan ini adalah para pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan harapan tercapainya sebuah mekanisme *updating* data pada aplikasi layanan kepegawaian yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan kepegawaian khususnya bagi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

#### E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini berlokasi di Semarang Jawa Tengah.

#### F. JADWAL KEGIATAN

N O	KEGIATAN	TAHUN 2020											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Belanja ATK			■			■					■	
2	Penggandaan			■			■	■				■	
3	Rapat Teknis Penghubung Kepegawaian			■			■	■				■	
4	Koordinasi/Konsultasi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Bimtek Simpeg Skpd						■						
6	Belanja Pengembangan Aplikasi				■	■		■	■	■			

## **G. KELUARAN**

Keluaran dari Pengembangan Sistem Informasi Data Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Terlaksananya Rapat Teknis Penghubung Pengelolaan layanan Kepegawaian tahun 2020.
2. Terelesainya Buku Profil Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 60 buku.
3. Terelesainya pengembangan subsistem/modul aplikasi pengelolaan kepegawaian sebanyak 5 aplikasi.
4. Meningkatkan kompetensi pengelola kepegawaian SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal pengelolaan layanan kepegawaian.
5. Terbentuknya kerjasama yang baik dalam pengelolaan data kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tersedia data kepegawaian yang akurat dan *up-to-date*.
6. Memberikan layanan informasi kepada *stakeholder* secara cepat, tepat dan *up-to-date*.
7. Persamaan persepsi dalam pengelolaan layanan kepegawaian melalui peningkatan kemampuan pengampu kepegawaian SKPD, sehingga mampu menjawab permasalahan di bidang pengolahan data pegawai yang pada akhirnya memberikan supporting data kepada Pimpinan dalam mengambil keputusan.
8. Inventarisasi ketersediaan sumber daya yang telah ada serta kebutuhan dan permasalahan dengan pelaksanaan koordinasi secara langsung ke SKPD.
9. Menyediakan informasi yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian.
10. Tersosialisasinya Perkembangan aplikasi layanan kepegawaian Provinsi Jawa Tengah.
11. Tersosialisasinya program maupun inovasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya secara komprehensif dengan dukungan SDM yang berkompotensi tinggi.
12. Termanfaatkannya program aplikasi layanan kepegawaian dan subsistem pendukungnya di masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung layanan bidang kepegawaian.

## **H. ANGGARAN**

Biaya penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dibebankan pada APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dikelola oleh BKD Provinsi Jawa Tengah.

## **I. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

**Semarang, Agustus 2019**

**KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN**

**UTAMI RAHAJENG. SH, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700113 98903 2 002